



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAESARAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. NHK : 516889

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.500.000.000

1. Tanah Seluas 883 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 2.822 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 8.040 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 3.000 m2/400 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 218.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SPMR2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 217.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.711.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	5.050.211.000
III. HUTANG	Rp.	383.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.667.211.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.